



DJPb
Indonesian Treasury

InTress KPPN
LWA

SEKINCAU





TRIWULAN IV 2025



Sekincau

Sekincau (Sekilas Kinerja dan Capaian Utama) sebagai buku informasi yang disusun dan dipublikasikan secara berkala kepada para stakeholder secara triwulanan. Sekincau menyampaikan capaian kinerja KPPN Liwa yang utama dan bersifat strategis bagi para stakeholder untuk meningkatkan transparansi pengelolaan APBN KPPN Liwa.



 KPPN Liwa, Jl. Raden Intan, Way Mengaku, Kec. Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Lampung 34813
 kppnliwa@kemenkeu.go.id
 <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/liwa/id/>
 @kppnliwa
 @kppnliwa
 KPPN Liwa

Tim Penyusun

Maria Lucky A.	Syahira
Benie Habrian	Saraswati P.S.
Bangkit W.	Citra Maharani
Edy S.	Indah R. Wulandari
Ning Euis	M. Aman Sautra
M. Verdito Vigo	Mitha Salsabila O.
Dinda Larasati D.	

Foto dan Data

Dokumentasi KPPN Liwa

Lucky



Bangkit



Edy



Ning



Berie



Our Team

Saras



Mitha



Indah



Aman



Syahira



Citra



Vigo



Dinda





TABLE OF CONTENTS

05 **Realisasi Belanja K/L**
Menampilkan data pagu dan realisasi belanja K/L secara total

07 **Komposisi Pagu APBN**
Menampilkan data pagu dan realisasi belanja K/L per kabupaten dan jenis belanja

09 **PNBP Satker**
Menampilkan data jenis PNBP terbesar dan satker dengan PNBP tertinggi di lingkup KPPN Liwa

11 **Implementasi Aplikasi MyIntress**
Menampilkan informasi manfaat aplikasi MyIntress

13 **Transfer ke Daerah**
Menampilkan data pagu dan realisasi belanja pemda secara total

15 **DAK Fisik & Non Fisik**
Menampilkan data pagu dan realisasi belanja DAK Fisik per kabupaten

19 **Dana Desa & Insentif Fiskal**
Menampilkan data pagu dan realisasi belanja Dana Desa dan Insentif Fiskal per kabupaten

21 **Dana Transfer Umum**
Menampilkan data pagu dan realisasi belanja DAU dan DBH per kabupaten

23 **Mengenal lebih dekat dengan Risiko**
Menampilkan informasi mengenai cara Menilai Kemungkinan dan Dampak Risiko

25 **Penerapan Eco Office di Lingkungan Kemenkeu**
Penghargaan, penilaian gedung kantor ramah lingkungan Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Sekilas Kinerja dan Capaian Utama "Sekincau" KPPN Liwa edisi Triwulan IV Tahun 2025 ini dapat kami selesaikan dengan baik. Tujuan penerbitan Sekincau KPPN Liwa ini adalah untuk memberikan informasi dan gambaran umum mengenai kinerja KPPN Liwa dalam penyaluran APBN periode Triwulan IV Tahun 2025 yang mencakup pagu dan realisasi belanja pemerintah lingkup Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat, PNPB di wilayah kerja KPPN Liwa, penyaluran Transfer ke Daerah serta perkembangannya di Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat, dan informasi sekilas terkait Manajemen Risiko dan Implementasi Aplikasi MyIntress. Dengan semangat nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan, kami akan terus berupaya membangun organisasi yang lebih baik dengan terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik agar kepercayaan stakeholders khususnya, serta publik pada umumnya, semakin meningkat sesuai janji layanan kami yaitu pelayanan "TRUST" Transparan, Ramah, Utamakan Pelayanan, Sempurna, dan Tanpa Biaya. Harapan kami, edisi Sekincau ini dapat memberikan informasi terkini kepada seluruh stakeholders baik satuan kerja, pemerintah daerah, pihak perbankan, maupun masyarakat terkait dengan pelaksanaan anggaran dan isu prioritas lainnya yang dapat mendukung peningkatan kinerja KPPN Liwa. Akhir pengantar, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan menyelesaikan penyusunan Sekincau KPPN Liwa ini.

Kepala KPPN Liwa,

Marvia Lucky Ariana

REALISASI BELANJA K/L

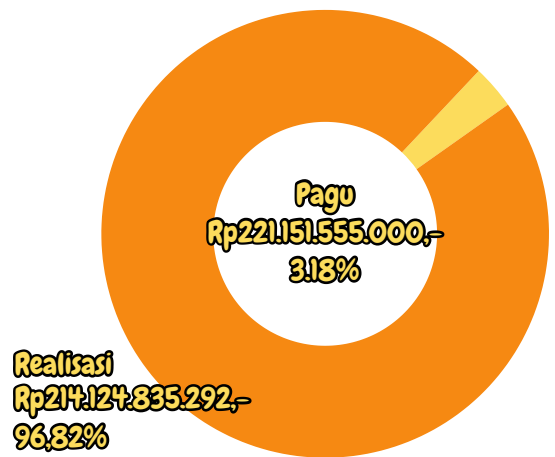
TRIWULAN IV
TAHUN 2025

Pelaksanaan realisasi belanja pemerintah Kementerian/Lembaga (K/L) yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memberikan kontribusi signifikan terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas di Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat. Dampak positif APBN terhadap perekonomian nasional antara lain mencakup stabilisasi perekonomian, peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta pemerataan pendapatan yang dilakukan secara transparan dan efisien. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

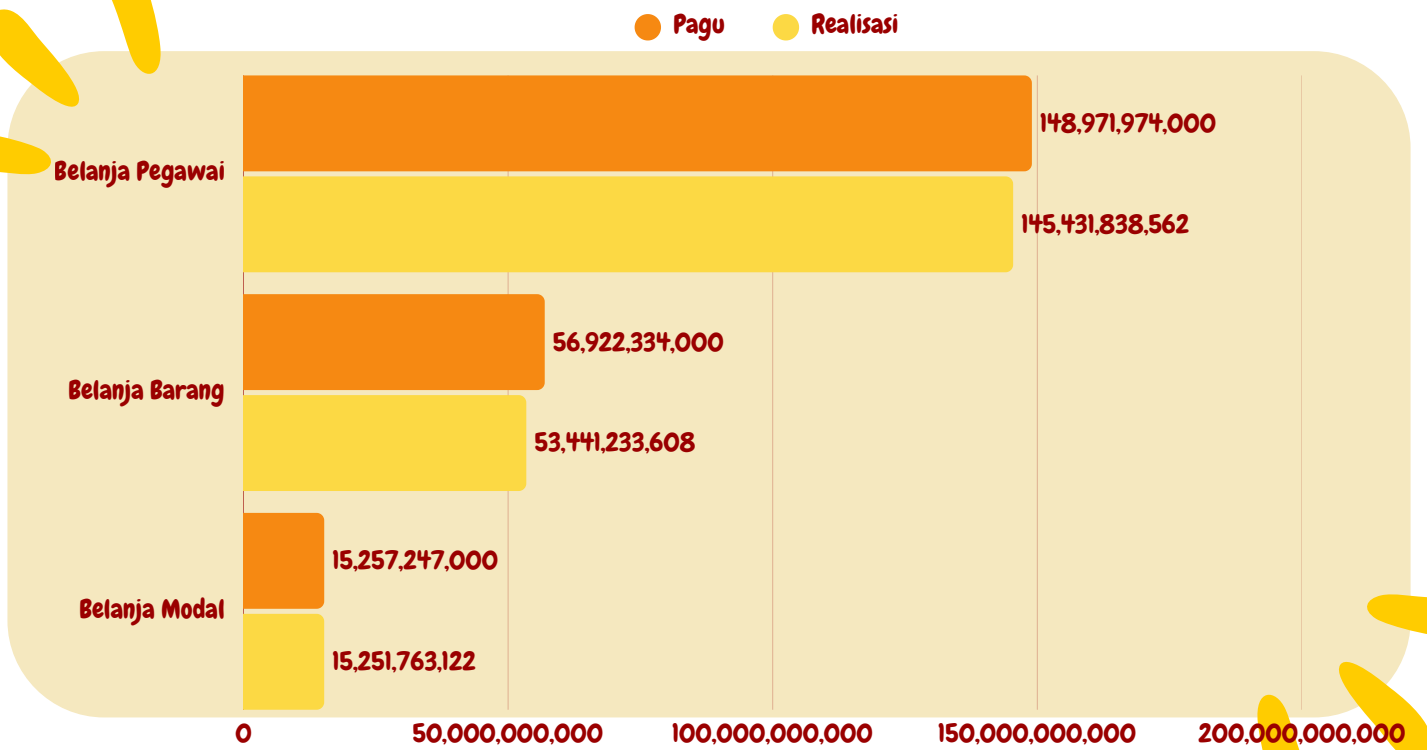
Selain itu, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Liwa sebagai unit pelaksana penyaluran alokasi Transfer ke Daerah (TKD) berkomitmen untuk mendukung peran tersebut melalui upaya peningkatan kualitas dan realisasi belanja, serta penguatan implementasi kebijakan penyaluran TKD Tahun Anggaran 2025. Dalam hal ini, KPPN Liwa berperan sebagai pengawal keuangan negara di daerah, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran negara dilakukan secara efektif, efisien, dan transparan.

Dengan demikian, pelaksanaan realisasi belanja pemerintah K/L yang dibiayai melalui APBN dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat, serta mendukung tercapainya tujuan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas dan realisasi belanja, agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah.

Persentase Realisasi Belanja K/L sampai dengan Triwulan IV 2025



Pagu dan Realisasi Belanja K/L sampai dengan Triwulan IV 2025



Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, total pagu anggaran yang disediakan adalah sebesar Rp221.151.555.000,- dan realisasi anggaran yang dicapai sebesar Rp214.124.835.292,- atau sekitar 96,82% dari total pagu. Dalam rincian belanja, terdapat beberapa kategori yang memiliki realisasi di bawah target yang disebabkan oleh adanya penambahan pagu belanja dari Eselon 1 K/L.

Belanja Barang, misalnya, mencapai realisasi sebesar Rp53.441.233.608,- atau sekitar 93,88% dari pagu sebesar Rp56.922.334.000,- dengan target realisasi 65% (kebijakan threshold). Demikian pula dengan Belanja Modal, yang hanya mencapai realisasi sebesar Rp15.251.763.122,- atau sekitar 99,96% dari pagu sebesar Rp15.257.247.000,- dengan target realisasi 65% (kebijakan threshold). Realisasi Belanja Pegawai mencapai Rp148.971.974.000,- atau sekitar 97,62% dari pagu sebesar Rp145.431.838.562,-.





Komposisi

Kab. Lampung Barat

Kode Satker	Nama Satker	Pagu	Realisasi	%
402331	Pengadilan Agama Krui	148.500.000	144.788.500	97,50%
641923	Polres Lampung Barat	45.800.868.000	45.552.250.303	99,46%
656731	KPU Kabupaten Lampung Barat	5.592.308.000	5.591.022.142	99,98%
547512	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat	36.534.685.000	34.355.167.137	94,03%
547517	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat	104.800.000	104.770.000	99,97%
614883	Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat	5.854.746.000	5.500.871.303	93,96%
614884	Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat	142.715.000	141.636.400	99,24%
425002	Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lampung Barat	1.159.122.000	1.148.753.664	99,11%
597715	Madrasah Aliyah Negeri 1 Lampung Barat	1.438.101.000	1.436.841.900	99,91%
547514	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat	2.115.724.000	2.096.006.000	99,07%
552560	Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat	7.740.882.000	7.443.128.014	96,15%
634572	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negeri Liwa	1.147.315.000	914.561.576	79,71%
539604	Kantor Pertanahan Kab. Lampung Barat	6.234.319.000	5.438.255.656	87,23%
402330	Pengadilan Agama Krui	4.223.400.000	4.154.800.277	98,38%
547519	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat	143.118.000	142.812.480	99,79%
547513	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat	2.099.582.000	1.892.048.192	90,12%
559932	Kejaksaan Negeri Lampung Barat	8.929.925.000	8.833.434.358	98,92%

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 realisasi anggaran pemerintah Kabupaten Lampung Barat mencapai Rp124.891.147.902,- atau sekitar 96,51% dari total pagu sebesar Rp129.410.110.000,-.

REALISASI JENIS BELANJA



Belanja Barang: Realisasi sebesar Rp31.659.108.127,- atau sekitar 94,66% dari pagu sebesar Rp33.444.761.000,-.

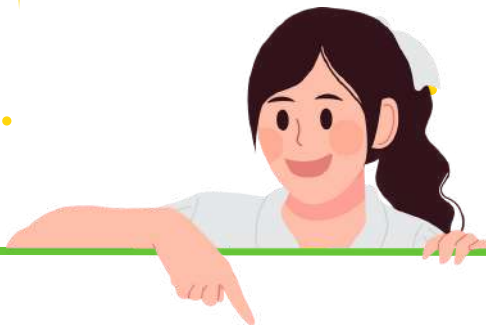


Belanja Pegawai: Realisasi sebesar Rp88.230.479.842,- atau sekitar 97% dari pagu sebesar Rp90.960.763.000,-.



Belanja Modal: Realisasi sebesar Rp5.001.559.933,- atau sekitar 99,94% dari pagu sebesar Rp5.004.586.000,-.

isi APBN



Kab. Pesisir Barat

Kode Satker	Nama Satker	Pagu	Realisasi	%
418180	Kantor Kementerian Agama Kab. Pesisir Barat	772.292.000	772.292.000	100%
418478	Kantor Kementerian Agama Kab. Pesisir Barat	277.100.000	277.100.000	100%
554155	Madrasah Aliyah Negeri 1 Pesisir Barat	1.911.409.000	1.908.737.273	99.86%
418408	Kantor Kementerian Agama Kab. Pesisir Barat	171.104.000	171.104.000	100%
689405	Kantor Pertanahan Kab. Pesisir Barat	5.499.963.000	4.748.837.636	86.34%
121306	KPU Kabupaten Pesisir Barat	5.419.027.000	5.494.284.695	101.39%
692350	Rutan Krui Kelas II B	6.016.897.000	5.669.383.490	94.22%
970106	Polres Pesisir Barat	46.422.955.000	46.136.179.489	99.38%
401837	Kantor Kementerian Agama Kab. Pesisir Barat	1.318.361.000	1.155.279.000	87.63%
007350	Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui	3.915.870.000	3.723.509.116	95.09%
418886	Kantor Kementerian Agama Kab. Pesisir Barat	19.980.518.000	19.176.980.691	95.98%

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 realisasi anggaran pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mencapai Rp89.233.687.390,- atau sekitar 97,30% dari total pagu sebesar Rp91.705.496.000,-.

REALISASI JENIS BELANJA



Belanja Barang: Realisasi sebesar Rp21.782.125.000,- atau sekitar 92,78% dari pagu sebesar Rp23.477.573.000



Belanja Pegawai: Realisasi sebesar Rp57.201.358.720,- atau sekitar 98,66% dari pagu sebesar Rp57.975.573.000,-.






Belanja Modal: Realisasi sebesar Rp10.250.203.189,- atau sekitar 99,98% dari pagu sebesar Rp10.252.350.000,-.

PNBP WILAYAH KERJA KPPN LIWA

Kontribusi PNBP dalam pembiayaan pembangunan di Indonesia semakin krusial keberadaannya sebagai sumber dana alternatif pengeluaran negara selain perpajakan. Hal ini karena PNBP dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara, sehingga dapat membantu membiayai berbagai program pembangunan yang sangat penting bagi kemajuan bangsa. Oleh karena itu, pengelolaan PNBP harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan transparan, agar dapat memastikan bahwa sumber daya negara dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan di Indonesia. PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan sebagai imbalan atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan PMK Nomor 58 Tahun 2023, PNBP menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah, serta dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara yang efektif dan efisien.

- 
Pengelolaan Barang Milik Negara dapat memberikan pendapatan kepada negara melalui sewa rumah dinas, gedung, maupun tanah, serta bentuk BMN lainnya.
- 
Hak Negara dapat memberikan pendapatan kepada negara melalui pendapatan administrasi dan penegakan hukum, seperti yang diterapkan di satker Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan.
- 
Pelayanan dapat memberikan pendapatan kepada negara melalui layanan yang diberikan kepada masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.



JENIS SETORAN PNBP TERTINGGI

1

425919 - Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu
Rp4.913.507.248,-

6

425341 - Pendapatan Pelayanan Pertanahan
Rp559.041.748,-

2

425263 - Pendapatan Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
Rp2.429.800.000,-

7

425261 - Pendapatan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)
Rp540.710.000,-

3

425351 - Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama
Rp1.524.600.000,-

8

425262 - Pendapatan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)
Rp452.645.000,-

4

425243 - Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan
Rp1.287.015.000,-

9

425276 - Pendapatan Pengamanan Obyek Vital dan Obyek Tertentu
Rp382.195.000,-

5

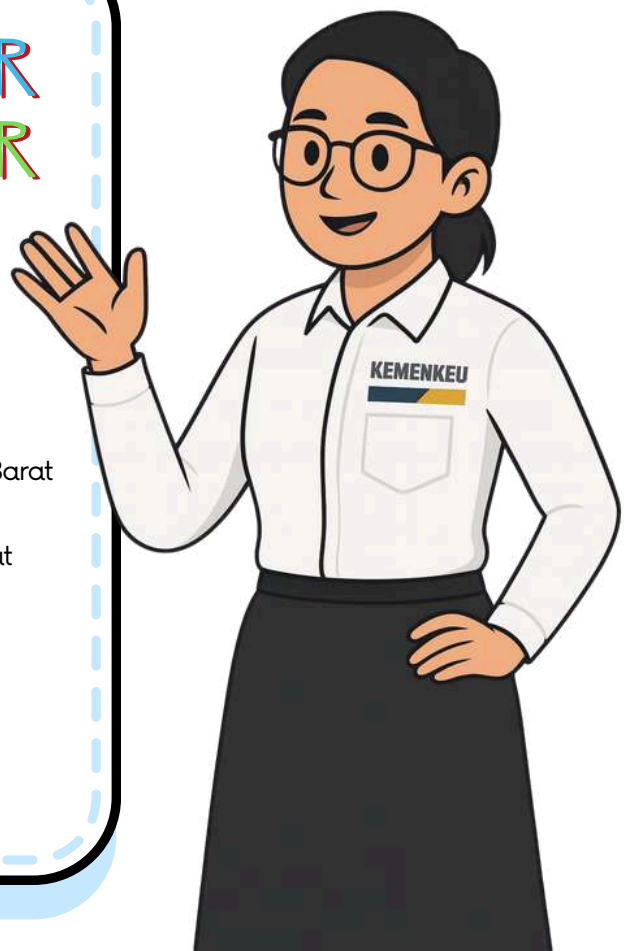
425265 - Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
Rp805.050.000,-

10

425273 - Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak dan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian
Rp360.750.000,-

**SATKER
PNBP TERBESAR**

- 1 641923-Polres Lampung Barat
Rp4.012.753.247,-
- 2 559932 -Kejaksanaan Negeri Lampung Barat
Rp1.651.698.319,-
- 3 970106 -Polres Pesisir Barat
Rp1.177.236.000,-
- 4 547513-Kantor Kementerian Agama Kab. Lampung Barat
Rp1.043.955.000,-
- 5 401837-Kantor Kementerian Agama Kab Pesisir Barat
Rp477.600.000,-
- 6 539604-Kantor Pertanahan Kab Lampung Barat
Rp381.900.869,-
- 7 689405-Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Barat
Rp199.847.146,-
- 8 656731-KPU Kabupaten Lampung Barat
Rp110.845.020,-



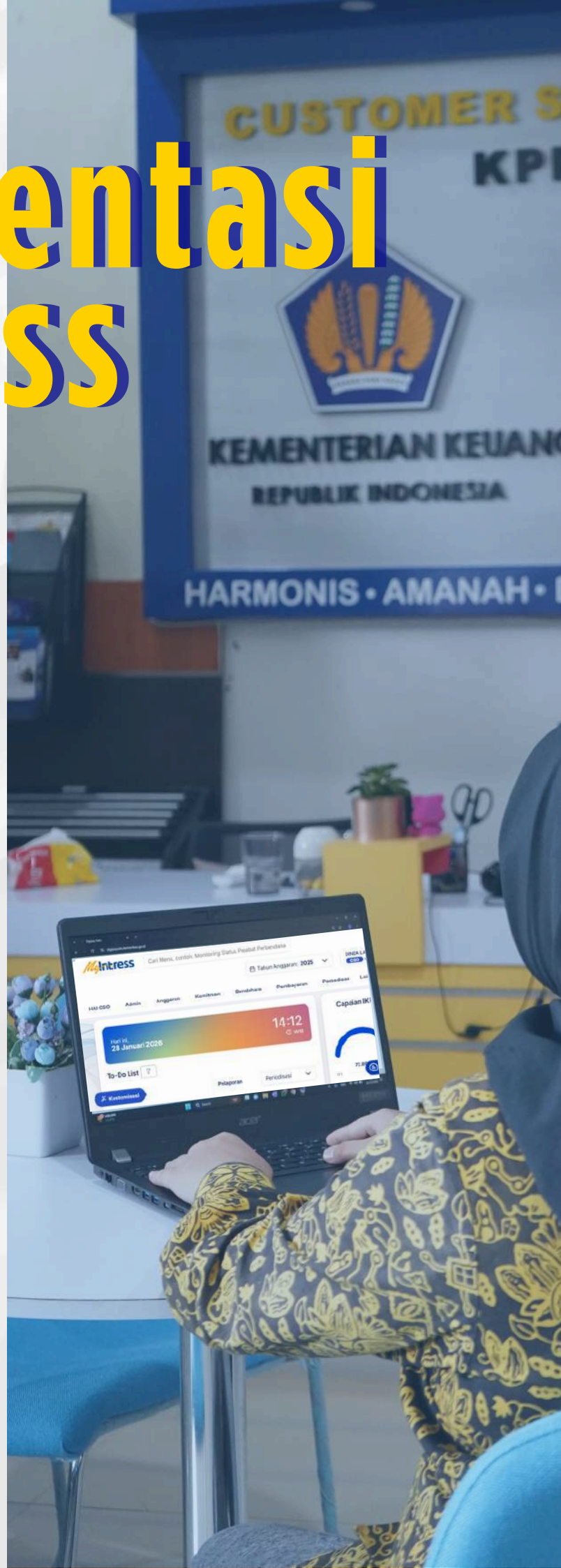
Implementasi MyIntress



Penulis: Muhammad Verdito Vigo

Aplikasi MyIntress merupakan inovasi terbaru Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam mendukung penguatan monitoring, evaluasi, dan konsultasi pengelolaan keuangan negara secara terintegrasi. Aplikasi ini mengintegrasikan data OMSPAN dan MonSAKTI sehingga satuan kerja dapat mengakses informasi keuangan secara komprehensif melalui satu pintu (single point of truth). Kehadiran MyIntress bertujuan meningkatkan efisiensi, akurasi data, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data dalam pengelolaan APBN.

MyIntress dikembangkan untuk menjawab tantangan fragmentasi data, duplikasi informasi, dan keterlambatan akses data yang selama ini dihadapi pengguna. Melalui sistem yang lebih sederhana dan terintegrasi, MyIntress memudahkan satuan kerja dan pimpinan dalam memantau kinerja anggaran, realisasi belanja, kepatuhan pelaporan, serta berbagai aspek pengelolaan keuangan negara secara real time. Fitur Dashboard dan Early Warning System (EWS) yang dilengkapi To Do List dan kalender pengingat juga berfungsi sebagai sistem peringatan dini terhadap potensi keterlambatan penyelesaian kewajiban, sehingga memperkuat pengendalian internal.



SERVICE OFFICER
KPPN LIWA



GAN

Ind

DIGITAL • AKUN

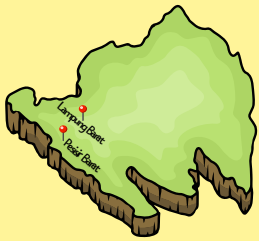


Selain fungsi monitoring dan evaluasi, MyIntress menyediakan fitur HAI-CSO yang memfasilitasi konsultasi satuan kerja dengan KPPN atau Kanwil mitra kerja melalui sistem tiket. Mekanisme ini menjadikan layanan konsultasi lebih terdokumentasi, transparan, serta mudah dipantau progres penyelesaiannya, sekaligus meningkatkan kualitas pendampingan kepada satuan kerja.

Di wilayah kerja KPPN Liwa, implementasi MyIntress menunjukkan perkembangan yang positif. Hingga Triwulan IV Tahun 2025, dari total 28 satuan kerja, sebanyak 27 satker telah terdaftar sebagai pengguna aktif MyIntress, sementara sisanya masih dalam tahap pemenuhan administrasi. Pada periode yang sama, tercatat 44 tiket konsultasi HAI-CSO yang diajukan, didominasi oleh konsultasi terkait pengelolaan anggaran, penerimaan, serta penyelesaian to do list. Tren ini menunjukkan bahwa MyIntress tidak hanya menjadi alat monitoring, tetapi juga media komunikasi dan pendampingan yang efektif dalam mendukung tata kelola APBN yang lebih akuntabel dan berkualitas.



TRANSFER KE DAERAH



2 KABUPATEN



4.057 KELUARGA
PENERIMA MANFAAT (KPM)



247 DESA



REALISASI 97.14% DARI
TOTAL PAGU TKD TA 2025



Tahun 2025, KPPN Liwa memiliki pagu sebesar Rp1.678 miliar untuk memperkuat pembangunan di Lampung Barat dan Pesisir Barat. Dari total tersebut, Lampung Barat mendapatkan Rp936 miliar, sedangkan Pesisir Barat Rp741 miliar.

Alokasi terbesar, yakni Rp1.051 miliar, dialokasikan untuk Dana Transfer Umum (DTU), yang mendukung pemerataan keuangan daerah dan ekualisasi kualitas layanan dasar daerah. Sementara itu, alokasi DAK Fisik dan Nonfisik masing-masing sebesar Rp128 miliar dan Rp267 miliar untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana fisik layanan dasar, serta pendanaan operasional layanan publik di kedua kabupaten. Dana Desa dan Insentif Fiskal sebesar Rp230 miliar juga dialokasi-

ALOKASI PAGU

Kab. Lampung Barat
& Pesisir Barat

-kan untuk peningkatan kemandirian desa di kedua kabupaten, serta mendorong kinerja pemerintah daerah dalam peningkatan tata kelola APBD.

PAGU PER JENIS TKD

Kategori	Lampung Barat	Pesisir Barat	Total
DAK Fisik	84.125.305.000	44.536.354.000	128.661.659.000
DAK Non Fisik	157.873.174.000	110.063.568.000	267.936.742.000
Dana Desa & Insentif Fiskal	120.471.186.000	109.528.965.000	230.000.151.000
Dana Transfer Umum	574.335.490.000	477.110.069.000	1.051.445.559.000
Total	936.805.155.000	741.238.956.000	1.678.044.111.000

KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH TAHUN 2025



Meningkatkan kualitas desentralisasi fiskal dengan memperkuat penggunaan earmarking DAU, meningkatkan efektivitas DAK, dan mengoptimalkan Dana Desa, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah



Mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dimana TKD difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah



Menguatkan sinergi kebijakan fiskal dimana kebijakan TKD disinergikan dengan kebijakan fiskal pusat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang lebih luas



Memperluas cakupan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga diharapkan kebijakan TKD dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera

DAK Fisik

TRIWULAN IV 2025

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan infrastruktur daerah, membuka akses baru bagi masyarakat, dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas publik lainnya, DAK Fisik membantu meningkatkan konektivitas antar-daerah, membuka peluang ekonomi baru, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan. Melalui program-program yang tepat sasaran, DAK Fisik menjadi investasi bagi kemajuan daerah, mempersiapkan generasi masa depan yang lebih baik, dan meningkatkan daya saing daerah dalam menghadapi tantangan global.

Dengan demikian, DAK Fisik tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga membangun fondasi yang kuat bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, membawa dampak positif yang signifikan bagi kehidupan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Fokus kebijakan DAK Fisik Tahun Anggaran 2025 ialah DAK Fisik Layanan Dasar, Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional, Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu, Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri.

Pagu DAK Fisik Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp84.125.305.000,-.

BERIKUT RINCIAN PAGU DAK FISIK KABUPATEN LAMPUNG BARAT PER SUBBIDANG:

No	Sub Bidang	Pagu	Realisasi	%
1	PAUD	988.172.000	987.928.205	99,98
2	SD	214.449.000	210.355.798	98,09
3	SMP	234.277.000	227.794.000	97,23
4	Keluarga Berencana	3.210.000.000	3.152.824.730	98,22
5	Penguatan Sistem Kesehatan	38.171.459.000	37.897.265.832	99,28
6	Jalan *)	27.298.352.000	-	-
7	Irigasi *)	4.675.976.000	-	-
8	Air Minum	4.219.044.000	4.176.228.100	98,99
9	Sanitasi	5.113.576.000	5.113.576.000	100

Sesuai dengan KMK Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 terdapat efisiensi pagu baik pada Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat. Subbidang Dana Alokasi Khusus Fisik yang terdampak efisiensi adalah Subbidang Jalan dan Irigasi.

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 realisasi DAK Fisik di wilayah Kabupaten Lampung Barat telah mencapai Rp51.765.972.665 atau sekitar 99,26% dari total pagu setelah efisiensi. Sementara DAK Fisik Bidang Jalan dan Irigasi sampai dengan berakhirnya triwulan IV tidak terdapat realisasi dikarenakan telah ditetapkannya KMK Nomor 29 Tahun 2025.

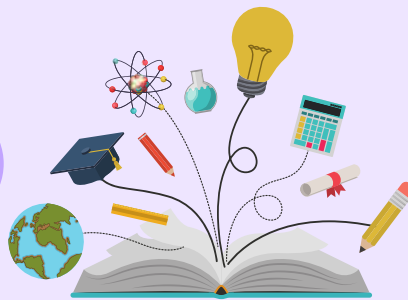
*) Jenis DAK Fisik yang terdampak Efisiensi Belanja Sesuai dengan KMK Nomor 29 Tahun 2025

Pagu DAK Fisik untuk Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 sebesar Rp44.536.354.000,- yang terbagi menjadi 5 subbidang DAK Fisik Penugasan, antara lain Subbidang SD, Penguatan Sistem Kesehatan, Jalan, Irigasi, Air Minum, dan Sanitasi. Sampai dengan triwulan IV 2025 realisasi DAK Fisik di wilayah Kabupaten Pesisir Barat telah mencapai Rp12.826.487.028,- atau sekitar 97,61% dari total pagu setelah efisiensi. Sama seperti Kabupaten Lampung Barat, tidak ada realisasi penyaluran DAK Fisik pada Subbidang Jalan dan Irigasi akibat adanya efisiensi anggaran Tahun 2025 sesuai ketentuan dalam KMK 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

BERIKUT RINCIAN PAGU DAK FISIK KABUPATEN PESISIR BARAT PER SUBBIDANG:

Subbidang SD

Pagu : Rp207.928.000,-
Realisasi : Rp199.865.968,-



Subbidang Air Minum

Pagu : Rp4.473.470.000,-
Realisasi : Rp4.380.045.000,-

Penguatan Sistem Kesehatan

Pagu : Rp4.955.904.000,-
Realisasi : Rp4.742.885.060,-



Subbidang Sanitasi

Pagu : Rp3.503.691.000,-
Realisasi : Rp3.503.691.000,-

Subbidang Jalan *)

Pagu : Rp30.639.819.000,-
Realisasi : -



Penguatan Irigasi *)

Pagu : Rp755.542.000,-
Realisasi : -

Meninjau dari pelaksanaan penyaluran DAK Fisik tahun sebelumnya, diperlukan perbaikan strategis antara lain, perlu dilakukan peningkatan realisasi DAK Fisik dengan memastikan penyaluran dana tepat waktu dan efektif. Hal ini dapat dicapai melalui pengawasan dan evaluasi rutin serta transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana. Selain itu, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan dan pendidikan juga perlu ditingkatkan.

DAK Non Fisik

TRIWULAN IV 2025

Tak hanya membangun daerah dari infrastruktur, DAK Non Fisik, sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah untuk mendukung pembangunan daerah melalui alokasi dana yang tidak bersifat fisik, menjadi kunci penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan memberdayakan masyarakat, sehingga kesenjangan antar-daerah dapat dikurangi dan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, dan DAK Non Fisik Lainnya. DAK Non Fisik membantu menciptakan lingkungan yang lebih sejahtera dan berkeadilan dan mempersiapkan generasi masa depan yang lebih baik. Melalui program-program yang tepat sasaran, DAK Non Fisik menjadi investasi bagi kemajuan daerah, membuka peluang baru bagi masyarakat, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan, perlu dibuat rencana strategis jangka panjang yang mempertimbangkan analisis dan prioritas pembangunan daerah. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kesehatan, serta penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi penggunaan dana. Dengan demikian, pembangunan di Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat dapat berjalan efektif dan optimal.

Dari setiap jenis DAK Nonfisik tersebut, **Pagu Kabupaten Lampung Barat** terbagi menjadi:

Dana BOS/P

Pagu : Rp42.693.170.000,-

Realisasi : Rp42.608.480.494,-

Dana Tunjangan Guru ASN Daerah

Pagu : Rp86.187.778.000,-

Realisasi : Rp86.179.546.700,-

Dana BOK

Pagu : Rp28.216.226.000,-

Realisasi : Rp28.215.701.063,-

DAK Nonfisik Lainnya

Pagu : Rp1.524.420.000,-

Realisasi : Rp1.524.420.000,-

Dana BOS/P :

BOS : Rp38.653.410.000,-

BOP PAUD : Rp2.898.110.000,-

BOP Kesetaraan : Rp1.141.650.000,-

Dana Tunjangan Guru ASN Daerah:

TPG ASN Daerah : Rp83.886.754.000,-

TKG ASN Daerah : Rp339.024.000,-

Tamsil Guru ASN Daerah : Rp1.962.000.000,-

Dana BOK:

BOK Dinas : Rp8.752.037.000,-

BOK Puskesmas : Rp14.021.783.000,-

BOK POM : Rp392.106.000,-

BOK KB : Rp5.050.300.000,-

DAK Nonfisik Lainnya:

Dana PPPA : Rp400.660.000,-

Dana Ketapang & Pertanian : Rp323.760.000,-

Dana BPP Perpustakaan : Rp800.000.000,-



Dana BOS/P

Pagu : Rp28.388.311.000,-
Realisasi : Rp28.380.881.500,-

Dana Tunjangan Guru ASN Daerah

Pagu : Rp58.861.974.000,-
Realisasi : Rp58.834.474.100,-



Dana BOK

Pagu : Rp 20.734.664.000,-
Realisasi : Rp20.734.664.000,-

DAK Nonfisik Lainnya

Pagu : Rp528.340.000,-
Realisasi : Rp528.340.000,-



Dari setiap jenis DAK Nonfisik tersebut, **Pagu Kabupaten Pesisir Barat** terbagi lagi menjadi:

Dana BOSP :

BOS: Rp26.028.026.000,-
BOP PAUD: Rp2.095.805.000,-
BOP Kesetaraan: Rp264.480.000,-

Dana BOK:

BOK Dinas: Rp8.370.145.000,-
BOK Puskesmas: Rp8.739.969.000,-
BOKB: Rp3.624.550.000,-

Dana Tunjangan Guru ASN Daerah:

TPG ASN Daerah: Rp54.704.601.000,-
TKG ASN Daerah: Rp3.738.873.000,-
Tamsil Guru ASN Daerah: Rp418.500.000,-

DAK Nonfisik Lainnya:

Dana PPPA: Rp400.660.000,-
Dana Ketapang & Pertanian: Rp127.680.000,-

Adapun untuk DAK Non Fisik Lainnya pada Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat ditujukan untuk Dana Bantuan Pengembangan Program (BPP) Perpustakaan Daerah, Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh (BOP) Pertanian, Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Dalam keseluruhan, data DAK Nonfisik Kabupaten Pesisir Barat menunjukkan bahwa pengelolaan dana relatif efektif. Namun, terdapat tantangan yang perlu diatasi seperti keterlambatan penyaluran dana. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan strategis, seperti perkuat koordinasi dan pengembangan kapasitas SDM dalam pemenuhan percepatan syarat untuk penerbitan rekomendasi.

Dana Desa & Insentif Fiskal

TRIWULAN IV 2025

Dana Desa menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa serta untuk Bantuan Langsung Tunai. Dengan alokasi dana yang tepat sasaran, desa-desa dapat membangun infrastruktur dasar yang memadai, membiayai kegiatan pembangunan yang berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas layanan publik yang efektif. Kebijakan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 ditujukan untuk mendorong peningkatan dan kemandirian desa dan kualitas tata kelola dana desa, meningkatkan kualitas data keuangan desa berbasis elektronik terintegrasi dalam rangka memperkuat monitoring dan evaluasi dan mengarahkan fokus penggunaan dana desa melalui penanganan kemiskinan ekstrem melalui BLT Desa, penguatan desa untuk aksi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan desa termasuk stunting, dukungan program ketahanan pangan, pengembangan potensi dan keunggulan desa, percepatan implementasi desa digital, pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal, operasional pemerintah desa, program sektor prioritas lainnya di desa yaitu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, pemerintah akan menyalurkan Dana Desa ke 131 desa di Kabupaten Lampung Barat dan 116 desa di Kabupaten Pesisir Barat. Realisasi penyaluran sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 adalah sebesar Rp174,77 miliar yaitu mencapai 84,64 persen dari total pagu sebesar Rp206,48 miliar. Rendahnya penyaluran Dana Desa disebabkan karena ditetapkannya PMK 81 Tahun 2025 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025. Penetapan PMK tersebut ditujukan dalam rangka mendukung program Prioritas Nasional.

Pagu dan Realisasi Penyaluran Dana Desa Non-Earmark untuk tahap 1 dan tahap 2 di Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat adalah sebagai berikut:

Tahap	Lampung Barat		Pesisir Barat	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
I	31.145.406.770	31.145.406.770	21.992.259.074	21.992.259.074
II	31.120.736.930	12.281.495.890	30.304.453.516	17.433.231.096

Pagu dan Realisasi Penyaluran Dana Desa Earmark di Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat adalah sebagai berikut:

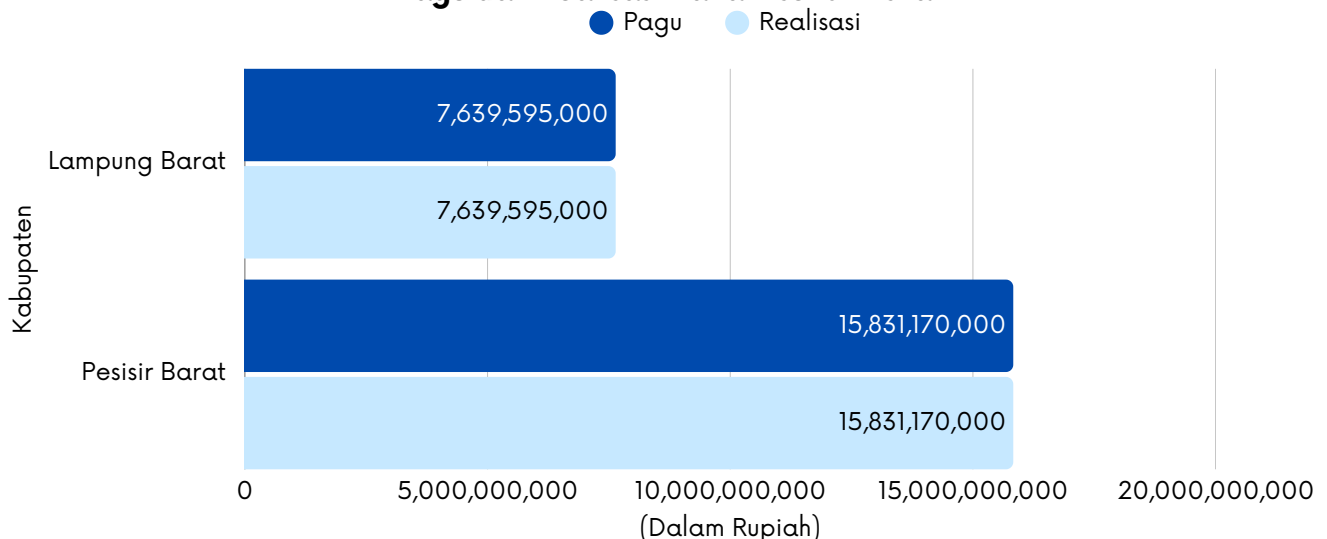
Tahap	Lampung Barat		Pesisir Barat	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
I	30.314.001.780	30.314.001.780	24.840.649.446	24.840.649.446
II	20.209.334.520	20.209.334.520	16.560.432.964	16.560.432.964

Selain menyalurkan Dana Desa, pemerintah juga memberikan dukungan tambahan kepada daerah melalui Dana Insentif Fiskal. Insentif Fiskal (IF) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. Dukungan ini tidak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, tetapi juga memberikan manfaat insentif fiskal yang signifikan bagi daerah.

Kebijakan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 antara lain pengalokasian berdasarkan kinerja tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan; indikator kinerja tahun sebelumnya meliputi pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar; indikator kinerja tahun berjalan meliputi dukungan pencapaian target prioritas nasional, mendorong peran Insentif Fiskal untuk meningkatkan kemandirian daerah antara lain melalui peningkatan pajak daerah, retribusi daerah, dan/atau sumber pembiayaan lain; melanjutkan pemberian insentif fiskal kepada daerah tertinggal dengan tetap memperhatikan kinerja daerah tertinggal.

Total pagu Insentif Fiskal yang dikelola KPPN Liwa yaitu Rp23.470.765.000,- untuk Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp7.639.595.000,- dan Kabupaten Pesisir Barat sebesar Rp15.831.170.000,-. Sampai dengan akhir triwulan IV 2025 total realisasi dana insentif fiskal sebesar Rp23.470.765.000,- atau 100% dari total pagu.

Pagu dan Realisasi Dana Insentif Fiskal



Dana Transfer Umum

TRIWULAN IV 2025

Dana Transfer Umum menjadi salah satu instrumen penting dalam kebijakan fiskal pemerintah, yang terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi kunci penting dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah. Dengan alokasi yang adil dan transparan, DAU membuka peluang bagi daerah-daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik, membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah, dan membangun infrastruktur yang berkelanjutan.

Kebijakan Penyaluran DAU Tahun Anggaran 2025 antara lain melanjutkan kebijakan pengalokasian DAU diantaranya kebijakan holdharmless sampai tahun 2027; memperkuat penggunaan earmarking DAU; menjaga tingkat pemerataan keuangan daerah bertujuan untuk mengurangi disparitas pendapatan dan kemampuan keuangan antara daerah-daerah; meningkatkan kualitas tata kelola earmarking DAU; menjaga tingkat pemerataan keuangan daerah melalui penyesuaian bobot formula, dan peningkatan kualitas data dasar penghitungan alokasi DAU, serta melanjutkan kebijakan peningkatan kinerja pengelolaan belanja APBD melalui penyaluran DAU berbasis kinerja.

Total Pagu DAU yang dikelola KPPN Liwa yaitu Rp1.043.585.416.000,- yang terdiri dari Rp573.481.772.000,- untuk Kabupaten Lampung Barat dan Rp470.103.644.000,- untuk Kabupaten Pesisir Barat. Total dana tersebut dialokasikan untuk DAU Block Grant dan DAU Spesific Grant.

Sesuai dengan KMK Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 terdapat efisiensi pagu DAU untuk jenis Dukungan bidang Pekerjaan Umum masing-masing sebesar Rp20.625.017.000,- pada Kabupaten Lampung Barat dan Rp26.369.919.000,- pada Kabupaten Pesisir Barat.

Total penyaluran realisasi DAU di KPPN Liwa sampai dengan Triwulan IV 2025 mencapai 99,20% atau sebesar Rp988.609.019.064,- dengan rincian sebagai berikut: realisasi sebesar Rp551.781.034.483,- untuk Kabupaten Lampung Barat dan Rp436.827.984.581,- untuk Kabupaten Pesisir Barat.

Dari setiap jenis DAU pada Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat terbagi lagi menjadi:

Kabupaten Lampung Barat

- BG : Rp474.740.845.000,-
- Formasi PPPK : Rp6.481.554.000,-
- Kelurahan : Rp1.000.000.000,-
- Pendidikan : Rp32.897.621.000,-
- Kesehatan : Rp21.624.945.000,-
- PU : Rp20.625.017.000,- *)
- Dukungan THR dan Gaji-13 Guru : Rp16.111.790.000,-

Kabupaten Pesisir Barat

- BG : Rp339.914.455.000,-
- Formasi PPPK : Rp24.114.168.000,-
- Kelurahan : Rp400.000.000,-
- Pendidikan : Rp43.593.625.000,-
- Kesehatan : Rp25.444.598.000,-
- PU : Rp26.369.919.000,- *)
- Dukungan THR dan Gaji-13 Guru : Rp10.266.879.000,-

*) Jenis DAU yang terdampak Efisiensi Belanja Sesuai dengan KMK Nomor 29 Tahun 2025

Selain Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil (DBH), yang menjadi bagian Dana Transfer Umum, dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. DBH menjadi katalisator penting dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan prinsip bagi hasil yang adil dan transparan, DBH membuka pintu bagi daerah-daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, membiayai proyek-proyek pembangunan yang inovatif, dan meningkatkan kualitas layanan publik yang efektif.

Dana Bagi Hasil (DBH) di Indonesia terdiri dari beberapa jenis, antara lain:

1. **DBH Pajak:** Dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan penerimaan pajak yang dihasilkan oleh daerah tersebut.
2. **DBH Sumber Daya Alam (SDA):** Dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan penerimaan dari eksploitasi sumber daya alam, seperti minyak bumi, gas alam, dan mineral.
3. **DBH Sawit:** Dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan penerimaan negara yang berasal dari pajak dan royalti perkebunan kelapa sawit.

Sampai dengan akhir Triwulan IV ini, penyaluran DBH lingkup KPPN Liwa mencapai 88% dari total pagu Rp35.910.356.000,-. Realisasi untuk dua kabupaten yaitu sebesar Rp31.600.178.900,- dengan rincian untuk Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp17.826.596.000,- dan untuk Kabupaten Pesisir Barat sebesar Rp18.083.760.000,-.

Dari setiap jenis DBH tersebut pada Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat terbagi lagi menjadi:

Lampung Barat:

- PPh Pasal 21 : Rp5.403.188.000,-
- PPh Pasal 25/29 : Rp273.310.000,-
- PBB : Rp2.646.239.000,-
- SDA Minyak Bumi : Rp4.218.284.000,-
- Pertambangan Umum - Iuran Tetap : Rp157.434.000,-
- Pertambangan Umum - Royalti : Rp31.000,-
- SDA Panas Bumi-Setoran Bagian Pemerintah : Rp2.154.787.000,-
- SDA Panas Bumi-Iuran Tetap : Rp28.125.000,-
- SDA Kehutanan : Rp133.594.000,-
- SDA Perikanan : Rp851.176.000,-
- Sawit : Rp1.833.768.000,-
- CHT : Rp126.660.000,-

Pesisir Barat:

- PPh Pasal 21 : Rp4.782.304.000,-
- PPh Pasal 25/29 : Rp230.677.000,-
- PBB : Rp2.665.145.000,-
- SDA Minyak Bumi : Rp4.218.284.000,-
- Pertambangan Umum - Iuran Tetap : Rp3.563.000,-
- Pertambangan Umum - Royalti : Rp31.000,-
- SDA Panas Bumi-Setoran Bagian Pemerintah : Rp2.154.787.000,-
- SDA Panas Bumi-Iuran Tetap : Rp12.095.000,-
- SDA Kehutanan : Rp48.711.000,-
- SDA Perikanan : Rp1.751.439.000,-
- Sawit : Rp2.096.043.000,-
- CHT : Rp120.681.000,-

Penerapan Eco Office di Lingkungan Kemenkeu

KMK 384 Tahun 2024

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup, timbulan sampah di Indonesia pada tahun 2025 mencapai 23 juta ton atau 63,2 ribu ton per hari. Dari jumlah tersebut jumlah sampah yang terkelola hanya sebesar 8 juta atau 35%-nya saja, sisanya membusuk di TPA menghasilkan bau dan gas metana serta rawan terbakar. Permasalahan ini menjadi salah satu penyebab efek rumah kaca dan juga pencemaran lingkungan sehingga pengelolaan sampah di Indonesia perlu ditingkatkan.

Dalam rangka mendukung peningkatan pengelolaan sampah di Indonesia, sejak tahun 2009, Kementerian Keuangan telah membuat kebijakan melalui Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-6/MK.1/2009 tentang Penerapan Kantor Ramah Lingkungan (Eco Office) di Lingkungan Kementerian Keuangan. Surat Edaran ini menjadi pedoman bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan dalam mewujudkan Kantor Ramah Lingkungan.



PIAGAM ECO

KATE

PLAT

DIBERIKAN

KPPN

TELAH MEME

PENERAPAN GEDUNG KAN

DI LINGKUNGAN KEM

Am (

GANTI LIS

PLT. KEPALA BI
BARANG M
DAN PEN

**GO
Green**



Pada tahun 2024, Menteri Keuangan menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 384 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerapan Gedung Kantor Ramah Lingkungan di Lingkungan Kementerian Keuangan dalam hal memasifkan penerapan gedung kantor ramah lingkungan serta memberikan penilaian dan award kepada Satuan Kerja yang menerapkan gedung kantor ramah lingkungan di Kementerian Keuangan. Tindakan tersebut dilakukan untuk membentuk budaya kementerian keuangan yang sadar dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

KPPN Liwa, sebagai salah satu kantor vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai penerapan gedung kantor ramah lingkungan dan mendapatkan penghargaan dengan kategori tertinggi yaitu kategori Platinum pada periode II penilaian gedung kantor ramah lingkungan Tahun 2025.

Penghargaan ini kiranya dapat menjadi langkah kecil perubahan yang akan menjadi investasi berharga bagi kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang.

CO OFFICE

KATEGORI

PLATINUM

BERHARGA KEPADA:

LIWA

MEMENUHI SYARAT

GEDUNG KANTOR RAMAH LINGKUNGAN

DITINGKAT KEMENTERIAN KEUANGAN

PASTIKAN
Aset Kita

awm

S ARIYADI

DIREKTOR MANAJEMEN
ASSET NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN



GAMOLAN PEKHING

Ciri k

Gamolan Pekhing (juga disebut **Cetik**) adalah alat musik pukul tradisional khas Lampung, Sumatera, yang terbuat dari bilah-bilah bambu berjejer di atas wadah kayu, menghasilkan nada saat dipukul dengan stik bambu, berfungsi dalam ritual adat serta berkembang menjadi instrumen kolaborasi modern dan bagian dari kurikulum sekolah di Lampung.

Di masa lalu, Gamolan Pekhing hanya dimainkan dalam ritual adat dan penyambutan tamu penting, sehingga ia sempat jarang terdengar oleh generasi muda. Karena tidak ada standar penataan nada yang baku, keberadaan alat musik ini sempat redup sebelum tahun 1990-an. Namun sejak saat itu, seniman lokal seperti Syafril Yamin membantu membuat tata nada atau notasi yang lebih baku. Dukungan pemerintah daerah juga membuat gamolan pekhing menjadi bagian dari muatan lokal di sekolah-sekolah Lampung, serta tampil dalam berbagai pertunjukan budaya modern.

◆ Asal dan Bentuk:

Gamolan Pekhing berasal dari Liwa, Kabupaten Lampung Barat dan terbuat dari bambu yang dirangkai membentuk seperti xilofon dengan sejumlah bilah bambu yang disusun dari panjang ke pendek. Ketika dipukul menggunakan stik kayu, bambu-bambu ini menghasilkan nada unik yang khas. Bentuknya sekilas mirip dengan gamelan Jawa, tetapi berbeda dalam bahan dan cara bunyinya.

◆ Makna Budaya

Selain sebagai instrumen musik, Gamolan Pekhing berfungsi sebagai bagian penting dalam upacara adat dan pertunjukan tradisional Lampung. Suaranya dianggap membawa nuansa magis dan menjadi penghubung antara generasi sekarang dengan warisan budaya leluhur. Keberadaannya yang kini dikenalkan kembali pada masyarakat luas menunjukkan pentingnya pelestarian tradisi lokal.

Sumber: www.indonesiakaya.com



khlas:

◆ Ornamen:

- Motif ukiran Lampung

Pada bagian rangka atau penyangga, kadang terdapat ukiran khas Lampung seperti: motif flora (daun, sulur), motif geometris sederhana. Ornamen ini melambangkan kehidupan, keselarasan, dan kebersamaan.

- Warna alami bambu

Umumnya gamolan pekhing tidak dicat mencolok. Warna yang ditonjolkan adalah: coklat muda, kuning alami bambu. Ini melambangkan kesederhanaan dan kedekatan dengan alam.

- Hiasan tali atau ikatan rotan

Bilah bambu diikat menggunakan rotan atau tali alami, yang selain fungsional juga menjadi elemen estetis. Ikatan ini melambangkan persatuan dan kekuatan adat.

◆ Fungsi dalam kehidupan sehari-hari

I Pengiring Upacara Adat

Gamolan Peking digunakan untuk pemberian gelar adat, upacara perkawinan adat, dan berbagai acara budaya lainnya.

II Sarana Ritual dan Spiritual

Gamolan Peking juga berfungsi sebagai media penghubung antara manusia dan leluhur.

III Pengiring Seni Pertunjukan

Gamolan Peking juga berfungsi sebagai alat untuk mengiringi tari tradisional Lampung dan nyanyian adat.

IV Pelestarian Budaya

Gamolan Peking menjadi simbol kebanggaan dan identitas masyarakat Lampung yang diwariskan dari generasi ke generasi dan sebagai bahan ajar.

Sumber: www.liputan6.com



KPPN LIWA



Oktober-Desember 2025



Upacara Hari Oeang RI ke-79



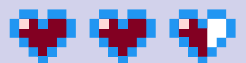
Peresmian SPPG Lampung Barat



Rapat Koordinasi Wilayah Lingkup Kanwil DJPb Lampung



Sosialisasi LLAT





Kegiatan Tutup Tahun 2025



Survei UK3TSP



Kunjungan Kanwil Bank BSI



One on One Meeting dengan BPS Pesisir Barat



Sosialisasi Pengisian SPT



Monev Pelaksanaan Anggaran Polres Lampung Barat



Hari Anti Korupsi Sedunia 2025



Penyaluran TKD & Pra Rekon Pajak Pemda Lampung Barat



Sosialisasi Coretax oleh KP2KP Liwa



Simulasi Pencegahan Kebakaran



MENURUN

- 1 Salah satu inovasi Kementerian Keuangan dalam mendukung Monitoring Pelaksanaan Anggaran dan Konsultasi
- 2 Dana dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diberikan pemerintah pusat kepada desa disebut dana
- 3 Menu Konsultasi dalam aplikasi MyIntress disebut
- 4 Dana Bagi Hasil (DBH) di Indonesia terdiri dari beberapa jenis, antara lain, DBH Pajak, Sumber daya alam dan
- 5 kelompok akun belanja pemerintah yang digunakan untuk pengeluaran operasional yang manfaatnya habis pakai atau jangka pendek (≤ 1 tahun). disebut belanja

MENDATAR

- 2 alat musik pukul tradisional khas Lampung, yang terbuat dari bilah-bilah bambu berjejer di atas wadah kayu yang disebut juga cetik bernama Pekhing
- 6 Aplikasi MyIntress mengintegrasikan dua aplikasi perbendaharaan sebelumnya yaitu MonSAKTI dan
- 7 Dana dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah sebagai bentuk penghargaan (reward) atas kinerja tertentu yang dinilai baik disebut dana insentif
- 8 Program penyediaan makanan bergizi bagi sasaran tertentu (umumnya siswa/peserta didik, bisa juga kelompok lain sesuai kebijakan) yang dibiayai dari APBN/APBD disebut
- 10 Gamolan Pekhing juga berfungsi sebagai media penghubung antara manusia dan leluhur merupakan sarana



kirim jawabanmu ke email
kppn145@gmail.com



Dapatkan hadiah menarik untuk
1 orang pemenang



MAKLUMAT PELAYANAN





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
TIPE A2 LIWA**

MAKLUMAT PELAYANAN

"DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU."

Liwa, 28 Januari 2026
Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Liwa



Ditandatangani secara elektronik
Maria Lucky Ariana

KOMPENSASI PELAYANAN





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A2 LIWA**

PEMBERIAN KOMPENSASI LAYANAN

1. KPPN Liwa memberikan kompensasi apabila layanan yang diberikan tidak sesuai dengan harapan *stakeholder* dan standar operasional prosedur (SOP).
2. Kompensasi diberikan kepada *stakeholder* berupa **Permohonan Maaf Secara Resmi, Bimbingan Teknis *On-the-Spot*, dan Layanan Prioritas.**

Liwa, 28 Januari 2026
Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Tipe A2 Liwa



Ditandatangani secara elektronik
Maria Lucky Ariana

TOLAK DAN LAPOR GRATIFIKASI !

DALAM BENTUK APAPUN

Biaya Seluruh
Layanan Kami

Rp **0** - ,

Langkah pertama adalah **MENOLAK**
dan **LAPORKAN** melalui Unit Pengendali
Gratifikasi (UPG) KPPN Liwa / GOL KPK



www.wise.kemenkeu.go.id



www.pengaduandjpb.kemenkeu.go.id



PEPADUN
bit.ly/adudu145



SALURAN PENGADUAN





SEKINCAU



SEKINCAU